

## PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN KURIKULUM

Nurul Iflaha, M.Pd.I  
Email: nvrulifl4h4@gmail.com

### *Abstract*

*Curriculum management is a cooperative, comprehensive, systemic and systematic on curriculum management system in order to release the achievement of curriculum goals through the process of planning, organizing, implementing and evaluating. Curriculum management is a form of effort by educational institutions to make learning effective, so that it becomes quality learning. Curriculum management is expected to be carried out on target by applying the principles of good governance. Good governance in Indonesian is "tata pemerintahan yang baik". Good governance is an administration focusing on democracy. The principles of good governance are various which applied in each organization, but there are some principles are considered to be the main application in organization namely participation, accountability and transparency. The principle of good governance is the principle aspired in every country, this principle can be also applied to smaller units such as educational institutions because there is a systemic organizational structure.*

**Keywords** : good governance and curriculum management.

### 1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan bagian dari sistem kehidupan yang memiliki peran penting dalam memajukan peradaban manusia dalam tiap Negara. Sepanjang sejarah peradaban manusia, pendidikan memiliki dinamika dan selalu berkembang menyesuaikan dengan keadaan. Hal ini tampak pada sistem dan struktur pendidikan yang selalu berubah tanpa merubah dasar dari pendidikan yakni mengedepankan persona manusia.

Salah satu contoh Negara yang mengalami dinamika sistem pendidikan adalah Indonesia. Setiap pergantian jabatan menteri pendidikan maka bergantilah kebijakan pendidikannya, begitulah yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Sindhunata menggambarkan persoalan pendidikan di Indonesia tidak ada habisnya sebagai "kegelisahan sepanjang zaman". Sebut saja dengan gonta-ganti kurikulum yang hanya "tambal-sulam" misalnya, menyibukkan dan sering membingungkan para kepala sekolah dan para guru di tingkat sekolah. Persoalan ini ujung-ujungnya merugikan peserta didik dan warga masyarakat sebagai pelanggan utama pendidikan di sekolah.<sup>1</sup>

Dari pergantian kurikulum tersebut, bergantilah segala aspek pengajaran yang harus dilaksanakan pendidik serta pengelolaan kurikulum oleh wakil kepala sekolah. Kurikulum yang berlakukan serta pendidik yang melaksanakan pengajaran harus tanggap demi terlaksananya kebijakan

---

<sup>1</sup> Sindhunata, *Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h.2

kurikulum yang pemerintah putuskan. Rupanya demi melaksanakan kebijakan tersebut secara tanggap, diperlukan kiat-kiat untuk memformulasi agar pengelolaan bagian sistem pengajaran dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Efektifitas yang digunakan salah satunya menerapkan prinsip *good governance* yang merupakan prinsip yang digunakan pemerintah dalam mengelola pemerintahan.

Prinsip *good governance* merupakan prinsip ideal untuk mengelola pemerintahan dengan baik. Prinsip *good governance* dapat pula diterapkan dalam mengelola organisasi yang lebih kecil seperti dalam lembaga pendidikan. Pengelolaan sekolah sebagai langkah dalam menjalankan sistem pendidikan harus menampakkan hasil yang berkualitas. Kualitas pendidikan tidak terlepas dari kualitas akademik yang dijalankan, kegiatan akademik tercermin dari kurikulum yang dilaksanakan. Pelaksanaan kurikulum yang efektif dan efisien membutuhkan pengelolaan kurikulum yang baik. Maka dibutuhkan pula prinsip-prinsip dalam pengelolaan kurikulum diantaranya dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip-prinsip *good governance* dalam setiap organisasi atau institusi beragam, namun pada penelitian ini menitikberatkan pada prinsip *good governance* yang diantaranya partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas.

## 2. Pengertian *Good Governance*

Istilah *Good Governance* merupakan frase berbahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu *good* dan *governance*. Istilah “*Good*” diterjemahkan dengan kata “baik”. Kata “Baik” pada hakikatnya mengandung makna tindakan moral untuk kepentingan orang banyak. Sedangkan *Governance* diterjemahkan sebagai penguasaan. Penguasaan dapat dipahami dengan memerintah, menyetir, mengarahkan atau mengendalikan. Dalam bahasa Indonesia *governance* diterjemahkan dengan tata pemerintahan. Istilah *governance* dipopulerkan pertama kali oleh Lembaga Internasional yakni Bank Dunia, melalui publikasinya yang diterbitkan tahun 1992 berjudul *Governance and Development*.<sup>2</sup> Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan *public good* dan *service*.<sup>3</sup>

*Good governance* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. Sedarmayanti menjelaskan arti *good* (baik) dalam *good governance*. Pertama, “baik” berarti nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan

<sup>2</sup> Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h 3

<sup>3</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Marpoyan Tujuh Publishing: Riau. 2005), h. 88.

berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>4</sup>

*Good governance* dapat diwujudkan pada tata pemerintahan yang diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab, solid, efektif dan efisien dengan mensinergikan interaksi tiga domain penting yaitu negara, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian *good governance* dapat dimaknai sebagai suatu tata pemerintahan yang diselenggarakan dengan baik dan benar yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat dengan penuh tanggung jawab, solid, efektif dan efisien.

### 3. *Prinsip Good Governance*

Prinsip *good governance* merupakan komponen-komponen yang menjadi landasan suatu pemerintahan disebut baik. Menurut Bhata bahwa unsur-unsur utama *governance* adalah akuntabilitas, transparansi, responsibilitas dan aturan hukum ditambah dengan kompetensi manajemen dan hak-hak asasi manusia.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Hanapih menegaskan beberapa prinsip *good governance* yaitu 1) partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik atau negara.

<sup>4</sup> Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003), h.2-8

<sup>5</sup> Kartika, Citrawati Fitri, dkk, *Good Environmental Governance*, (Malang: Universitas Brawijaya. 2012), h.34.

2) daya tanggap pemerintah terhadap setiap kepentingan masyarakat. 3) transparansi dalam kerangka arus sistem informasi antara pemerintah dan publik, dan antar lembaga pemerintah. 4) berkeadilan, tanpa diskriminasi dalam kerangka pembiasaan kesetaraan publik. 5) efektivitas kerja dan efisiensi sumber dan anggaran. 6) akuntabilitas publik dalam kerangka pemeliharaan legitimasi pemerintah di mata publik. 7) kesetaraan publik. 8) pluralisme publik. 9) kebebasan publik.<sup>6</sup>

Jumlah komponen atau pun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi.<sup>7</sup>

#### 1. Akuntabilitas

Salah satu bentuk perwujudan *good governance* adalah pengadaan laporan pertanggungjawaban yang jelas, efektif dan terukur. Pengadaan laporan pertanggungjawaban tersebut bertujuan agar tata kelola pemerintahan berhasil, dapat dipertanggungjawabkan dan terbebas dari KKN. Untuk merealisasikan laporan pertanggungjawaban dibutuhkan tanggungjawab dari masing-masing orang

<sup>6</sup> Kartika, *Good Environmental Governance*, h.23.

<sup>7</sup> Yusri, *Hukum Administrasi Negara*, h. 90.

yang sudah memiliki tugas masing-masing, sehingga dibutuhkan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Akuntabilitas merupakan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan dan kebijaksanaan yang telah ditempuh.<sup>8</sup> Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban seseorang dalam sebuah organisasi sesuai dengan profesi/kinerjanya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan dengan cara melaporkan laporan pertanggungjawaban kinerja secara periodik. Akuntabilitas juga dapat diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja seseorang atau organisasi kepada pihak-pihak yang mempunyai tugas meminta jawaban atau penjelasan dari orang atau organisasi yang telah diberikan wewenang untuk mengelola unit organisasinya.

Menurut Sirajudin H Saleh dan rekan, akuntabilitas sebenarnya merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal.

a. Dari sisi internal seseorang, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhannya. Akuntabilitas yang demikian ini meliputi pertanggungjawaban diri sendiri

mengenai segala sesuatu yang dijalankannya yang hanya diketahui dan dipahami oleh dia sendiri. Oleh karena itu, akuntabilitas internal ini disebut juga sebagai akuntabilitas spiritual. Akuntabilitas yang satu ini sangat sulit untuk diukur karena tidak adanya indikator yang jelas dan diterima oleh semua orang serta tidak ada yang melakukan pengecekan, pengevaluasian, dan pemantauan baik sejak tahap proses sampai dengan tahap pertanggungjawaban kegiatan itu sendiri. Semua tindakan akuntabilitas spiritual didasarkan pada hubungan seseorang tersebut dengan Tuhan.

b. Akuntabilitas eksternal terdiri dari :

1) Akuntabilitas Eksternal untuk Pelayanan Publik pada Organisasi Sendiri.

Dalam akuntabilitas ini, setiap tingkatan pada hierarki organisasi diwajibkan untuk *accountable* kepada atasannya dan kepada yang mengontrol pekerjaannya. Untuk itu, diperlukan komitmen dari seluruh petugas untuk memenuhi kriteria pengetahuan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan posisi tersebut. Akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya

---

<sup>8</sup> Mardiasmo, *Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah*, (Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 2001), h.251

baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat. Kegagalan seseorang untuk memenuhi akuntabilitas eksternal mengakibatkan pemborosan waktu, pemborosan sumber dana dan sumber-sumber daya yang lain, penyimpangan kewenangan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepadanya. Akuntabilitas eksternal lebih mudah diukur mengingat norma dan standar yang tersedia memang sudah jelas. Kontrol dan penilaian dari pihak eksternal sudah ada dalam mekanisme yang terbentuk dalam suatu sistem dan prosedur kerja.

2) Akuntabilitas eksternal untuk individu dan organisasi pelayanan publik di luar organisasi sendiri.

Akuntabilitas ini mengandung pengertian akan kemampuan untuk menjawab setiap pertanyaan yang berhubungan dengan capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan wewenang. Untuk itu, selain kebutuhan akan pengetahuan dan keahlian seperti yang disebutkan sebelumnya, juga dibutuhkan komitmen untuk melaksanakan kebijakan dan program-program yang telah

dijanjikan/dipersyaratkan sebelum dia memangku jabatan tersebut.<sup>9</sup>

2. Partisipasi masyarakat

Bentuk perwujudan *good governance* selanjutnya adalah adanya partisipasi dari masyarakat. masyarakat yang dimaksud adalah anggota-anggota yang ada dalam sebuah organisasi, lembaga maupun wilayah. Masyarakat turut ikut serta dalam pengambilan keputusan dan didorong untuk menyampaikan pendapatnya. Penerapan prinsip partisipasi masyarakat pada hakikatnya adalah keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jewell & Siegall mendefinisikan partisipasi dengan “keterlibatan anggota organisasi di dalam semua kegiatan organisasi”. Sedangkan Handoko menyatakan partisipasi “tindakan ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan di dalam organisasi”.<sup>10</sup> Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan partisipasi adalah bentuk keterlibatan orang yang berada dalam organisasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan organisasi.

Tujuan Partisipasi :

<sup>9</sup> Yusri, *Hukum Administrasi Negara*, h.92-93.

<sup>10</sup> Yusri, *Hukum Administrasi Negara*, h. 94

- a. Untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat.
  - b. Mengantisipasi berbagai isu yang ada.
  - c. Menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis.
  - d. Untuk merangsang keterlibatan masyarakat
3. Transparansi

Transparansi adalah salah satu prinsip terwujudnya *good governance*. Transparansi merupakan komponen dalam organisasi yang menjamin setiap orang bebas memperoleh informasi tentang penyelenggaraan organisasi, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi dapat diartikan keterbukaan untuk semua orang agar ikut serta dalam pengawasan pelaksanaan setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik.

Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Prinsip ini memiliki 2 aspek yaitu :

- a. komunikasi publik oleh pemerintah,

- b. hak masyarakat terhadap akses informasi.<sup>11</sup>

Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Tetapi secara ringkas dapat disebutkan bahwa, prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti :

- a. mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik
- b. mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
- c. mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.<sup>12</sup>

#### 4. Pengertian *Pengelolaan* Kurikulum

Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai manajemen. Manajemen suatu kegiatan mendayagunakan orang dan sumber-sumber lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien yang

<sup>11</sup> Yusri, *Hukum Administrasi Negara*, h.95.

<sup>12</sup> Yusri, *Hukum Administrasi Negara*, h.95.

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.<sup>13</sup>

Kurikulum secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang artinya “pelari” dan *curere* yang berarti “tempat berpacu”. Istilah kurikulum berasal dari dunia olah raga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno. Dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari kata *courier* yang berarti berlari (*to run*). Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai dengan finish untuk memperoleh medali atau penghargaan.<sup>14</sup> Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.<sup>15</sup>

Jadi, Pengelolaan kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum.<sup>16</sup> Dalam pelaksanaannya, pengelolaan kurikulum dilaksanakan secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian

tujuan berlandaskan kebijakan pendidikan nasional yang telah ditetapkan.

## 5. Ruang Lingkup, Prinsip Dan Fungsi Pengelolaan Kurikulum

Pengelolaan kurikulum merupakan bagian penting dalam sebuah pendidikan. Ruang lingkup pengelolaan kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum.

### 1. Perencanaan Kurikulum

Perencanaan kurikulum merupakan pengelolaan yang ditujukan pada keahlian merencanakan/*managing*. Keahlian yang dimaksud adalah kemampuan merencanakan dan mengorganisasikan kurikulum. Proses perencanaan kurikulum yang harus diperhatikan adalah siapa yang bertanggung jawab dalam perencanaan kurikulum, dan bagaimana perencanaan kurikulum itu direncanakan secara afektif. Ada dua kondisi yang perlu dianalisis setiap perencanaan kurikulum:

#### a. Kondisi sosiokultural

Kemampuan profesional manajerial menuntut kemampuan untuk dapat mengolah atau memanfaatkan berbagai sumber yang ada di masyarakat, untuk dijadikan narasumber. J.G Owen menyebutkan peranan para ahli *behavior science*, karena kegiatan pendidikan merupakan kegiatan behavioral dimana di dalamnya terjadi berbagai interaksi sosial

<sup>13</sup> Fitri Oviyanti, dkk. *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*. (Palembang: Noer Fikri, 2015), h.3-4

<sup>14</sup> Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum Cet. I*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya; 2011) .h. 2

<sup>15</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum, Seri II*; (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2009).h.3.

<sup>16</sup> Dakir. *Perencanaan Dan Pengembangan Kurikulum*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2004), h.3

antara guru dengan murid, murid dengan murid, dan atau guru dengan murid dengan lingkungannya.

b. Ketersediaan fasilitas

Salah satu penyebab gap antara perencana kurikulum dengan guru-guru sebagai praktisi adalah jika kurikulum itu disusun tanpa melibatkan guru-guru, dan terlebih para perencana kurang atau bahkan tidak memperhatikan kesipan guruguru di lapangan. Itulah sebabnya J.G Owen menyebutkan perlunya pendekatan “*from the bottom up*”, yaitu pengembangan kurikulum yang berasal dari bawah ke atas.<sup>17</sup>

Merencanakan pembelajaran merupakan bagian yang sangat penting dalam perencanaan kurikulum karena karena pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap siswa daripada kurikulum itu sendiri.<sup>18</sup> Maka perencanaan kurikulum harus dikembangkan dalam bentuk kerangka teori yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, kebutuhan sosial serta pengembangan masyarakat.

2. Pengorganisasian Kurikulum

Organisasi kurikulum sangat terkait dengan pengaturan bahan pelajaran yang ada dalam kurikulum, sedangkan yang menjadi sumber bahan pelajaran dalam kurikulum adalah nilai

budaya, nilai sosial, aspek siswa dan masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>19</sup>

Organisasi kurikulum merupakan kerangka program-program pembelajaran dalam periode tertentu yang akan diimplementasikan pada peserta didik dan terbentuk kedalam sebuah struktur. Struktur ini merupakan dasar yang cukup penting dalam mendesain pembelajaran dan berkaitan erat dengan tujuan program pendidikan yang akan dicapai.

Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang ditujukan agar peserta didik mudah dalam memahami bahan pelajaran serta mudah dalam melakukan kegiatan belajar sehingga kegiatan pembelajaran berjalan secara efektif dan tujuan pembelajaran dapat berhasil.

3. Pelaksanaan Kurikulum

Pelaksanaan kurikulum merupakan bentuk realisasi dari kebijakan kurikulum yang telah dirumuskan. Pelaksanaan kurikulum terbagi menjadi dua tingkatan yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Kepala sekolah adalah orang yang berperan pada tingkat, sedangkan guru adalah orang yang berperan pada tingkatan kelas. Kepala sekolah dan pendidik memiliki perannya masing-masing dalam pelaksanaan kurikulum,

<sup>17</sup> Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum, Cet. IV* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya: 2010).h. 151

<sup>18</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum*, h.21

<sup>19</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum*, h.60

sehingga tugas administrasi sekolah berbeda pula pada tiap-tiap peran. Meskipun demikian, antara kepala sekolah dan pendidik yang notabene memiliki tugas masing-masing, peran keduanya berkesinambungan dan saling melengkapi. Kedua peran tersebut saling bergandengan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan administrasi kurikulum yang tujuannya adalah tercapainya hasil penyelenggaraan kurikulum yang efektif.

Peran kepala sekolah adalah bertanggung jawab melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan yakni menyusun rencana tahunan, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, memimpin rapat dan membuat notula rapat, membuat statistik dan menyusun laporan.

Peran pendidik adalah bertanggungjawab melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Pendidik berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan pengajaran serta menilai peserta didik yang tertuang kedalam silabus serta RPP. Pembagian tugas pendidik terlebih dahulu harus diatur secara administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum di dalam kelas. Pembagian tugas-tugas tersebut meliputi tiga jenis kegiatan administrasi, yaitu : Pembagian

tugas mengajar, Pembagian tugas pembinaan ekstra kurikuler dan Pembagian tugas bimbingan belajar

#### 4. Evaluasi Kurikulum

Evaluasi adalah sebuah kegiatan yang menjadi bagian penting dari pengelolaan. Evaluasi kurikulum merupakan proses pemeriksaan sistematis terhadap proses pelaksanaan kurikulum dan akibat dari pelaksanaan pengembangan kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum mencakup dua hal yakni sebagai alat bantu yang digunakan dalam implementasi pembelajaran/kurikulum dan sebagai alat yang digunakan untuk menilai efektifitas program pembelajaran/kurikulum yang dibuat.

Evaluasi kurikulum dilaksanakan melalui pemeriksaan secara kontinyu dengan cara mencari informasi yang meliputi siswa, pendidik, program pembelajaran, dan proses belajar mengajar, sehingga dapat diketahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan pembelajaran serta efektivitas program.

Ada lima prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pengelolaan kurikulum, yaitu:

1. Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai

- hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum.
2. Demokratisasi, pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi, yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum.
  3. Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerja sama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.
  4. Efektivitas dan efisiensi, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut sehingga memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relative singkat.
  5. Mengarahkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum.<sup>20</sup>

Sedangkan fungsi dilaksanakannya pengelolaan kurikulum antara lain adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif.
2. Meningkatkan keadilan (*equality*) dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum.
3. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan, kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar.
4. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar.
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, proses pembelajaran selalu dipantau dalam

<sup>20</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum*, h.4

rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Disamping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum.

## 6. Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Kurikulum

### 1. Partisipasi

Menurut Dwiyanto suatu kebijakan publik dinilai partisipatif jika melibatkan multistakeholders (komponen masyarakat sipil) dari kebijakan itu.<sup>21</sup> Dalam penerapannya, Stakeholder bukan hanya merupakan sasaran dari tujuan adanya kebijakan, tetapi juga sekaligus menjadi pelaku utama dalam memutuskan suatu kebijakan yang dibuat. Seluruh stakeholder mempunyai peran serta dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan stakeholder dalam perumusan kebijakan diharapkan tidak hanya sebagai pelaku yang hanya akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, melainkan menjadi pelaku utama pula untuk

melaksanakan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan yang telah diputuskan. Dalam praktiknya, Bentuk keterlibatan seperti ini harus berlandaskan kebebasan berpendapat dan sikap yang konstruktif.

Partisipasi pada lembaga pendidikan tercermin dalam bentuk keterlibatan semua pihak yang ada pada lembaga pendidikan atau biasa disebut stakeholder. stakeholder merupakan kelompok atau individu di dalam atau luar organisasi yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi oleh pencapaian misi, tujuan dan strategi organisasi.<sup>22</sup> Stakeholder pendidikan adalah sekelompok orang atau pemangku kepentingan di lembaga pendidikan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan tujuan pendidikan. Stakeholder pendidikan meliputi stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder internal yakni kepala sekolah, pendidik dan peserta didik, sedangkan stakeholder eksternal yaitu orang tua murid, komite maupun supervisor.

Stakeholder pendidikan baik internal maupun eksternal adalah partisipan utama yang berperan penting yang menunjang diterapkannya prinsip *good governance* dalam lembaga pendidikan. Upaya untuk mewujudkan prinsip *good governance* sehingga menjadi pendidikan bermutu, diperlukan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya masing-masing unit. Semua bentuk tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing stakeholder pendidikan berpijak pada Undang-Undang

<sup>21</sup> Agus Dwiyanto, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2003), h.189

<sup>22</sup> Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 276.

Pendidikan Nasional yang berlaku, sehingga berdampak pada tercapainya tujuan pendidikan dan mampu mewujudkan proses pendidikan dalam memanusiakan manusia yakni peserta didik.

Kurikulum merupakan jantung dari pendidikan. Tanpa kurikulum proses pendidikan tidak akan terlaksana, sehingga mustahil tujuan pendidikan akan tercapai. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.<sup>23</sup> Dalam perumusannya, dibutuhkan pengelolaan kurikulum sehingga menjadi kurikulum yang tepat guna dan berkualitas. Pengelolaan kurikulum meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi/pengawasan.

Di dalam pelaksanaan pengelolaan kurikulum, salah satu tuntutan penting bagi pengelola kurikulum adalah adanya sebuah prinsip partisipatif dari seluruh stakeholder pendidikan. Keterlibatan stakeholder bertujuan agar kurikulum yang dirumuskan tepat sasaran. Prinsip partisipatif yang tercermin dalam perencanaan kurikulum yaitu keterlibatan kepala sekolah serta pengelola kurikulum yakni wakil ketua bagian kurikulum dalam merencanakan perumusan kurikulum, waktu, siapa saja yang terlibat dan administrasi-administrasi yang harus dipersiapkan seperti undangan, notulen,

berita acara serta lampiran yang mendukung terkait kurikulum. Perumusan kurikulum harus dilaksanakan setiap tahun sebelum tahun ajaran baru dimulai.

Pengorganisasian kurikulum tercermin pada keterlibatan kepala sekolah, pendidik, komite sekolah, pengawas sekolah (*supervisor*) dalam perumusan kurikulum yang disesuaikan dengan kebijakan kurikulum pusat serta kebutuhan muatan ekstrakurikuler yang mendukung pembelajaran. Dalam pengorganisasian harus ditegaskan mengenai tugas-tugas dari setiap pendidik, tenaga kependidikan serta sistem dan tata tertib berjalannya proses pembelajaran.

Dalam pelaksanaan pengelolaan kurikulum, prinsip partisipasi tercermin dari keterlibatan kepala sekolah dalam memantau terlaksananya proses pembelajaran. Kepala sekolah menjadi manajer yang dapat memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Objek dari pemantauan ini adalah tugas peserta didik, pendidik, para wakil kepala sekolah serta administrasi-administrasi dari masing-masing pelaku pendidikan. Keterlibatan juga dilaksanakan oleh pendidik, dengan tugasnya yang sudah tersirat pada kompetensi-kompetensi yang dimilikinya sebagaimana tertuang dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007. Kompetensi-kompetensi tersebut diterapkan dalam mengajar dan mendidik, serta administrasi pendidik yang harus dikerjakan seperti RPP, jurnal kelas,

<sup>23</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum*, h.3.

jurnal mengajar, lembar evaluasi peserta didik dan catatan pendidik untuk setiap siswa husus.

Sedangkan dalam evaluasi kurikulum, prinsip partisipasi juga tercermin pada hasil dari pekerjaan pendidik yang harus dikumpulkan serta dikoreksi dengan cara *sharing* oleh wakil kepala bagian kurikulum. Evaluasi kurikulum juga dapat dilaksanakan setiap bulan sekali dengan cara membahas tentang proses pembelajaran yang telah dilaksanakan sebulan sebelumnya atau dengan cara membuat laporan hasil proses pembelajaran secara periodik.

## 2. Transparansi

Transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah salah satu hal penting sebagai usaha merumuskan kebijakan yang melibatkan berbagai sumber daya serta berbagai stakeholder. Secara konkret, transparansi dalam pengelolaan kurikulum berkaitan dengan anggaran, sarana prasarana, kebijakan kurikulum, program, implementasi kurikulum serta evaluasi kurikulum. Transparansi adalah salah satu hal mendasar bagi terlaksananya pengelolaan kurikulum. Pelaksanaan pengelolaan kurikulum yang baik mengharuskan adanya keterbukaan dan kemudahan memperoleh informasi terhadap proses perumusan kurikulum bagi seluruh stakeholder pendidikan, khususnya dalam penggunaan berbagai sumber daya yang berkaitan langsung dengan tugas masing-masing stakeholder, sarana dan prasarana pembelajaran, anggaran untuk pembelajaran

untuk pengembangan sumber daya manusia dan lain-lain. Tanpa adanya transparansi, bentuk sinergi berbagai stakeholder sebagai salah satu aspek penting demi terlaksananya kurikulum yang baik dan berkualitas akan sangat sulit terwujud. Adanya prinsip transparansi memberikan kemudahan stakeholder untuk mengontrol terhadap pelaksanaan pengelolaan kurikulum melewati kemudahan akses informasi kurikulum.

Transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan kurikulum dapat dilihat pada:

- a. Perencanaan kurikulum : adanya informasi yang dapat diterima oleh seluruh stakeholder mengenai rencana perumusan kurikulum.
- b. Pengorganisasian kurikulum : adanya keterbukaan dalam penyampaian tugas masing-masing pemangku kepentingan, yakni pendidik sebagai guru dengan tugasnya masing-masing, tenaga kependidikan sebagai orang yang membantu dalam hal administrasi pendidikan, supervisor sebagai fasilitator serta unit penting dalam perumusan kurikulum, kepala sekolah sebagai manajer yang ikut serta memutuskan perumusan kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran efektif dan efisien serta wakil kepala masing-masing bagian dengan tugasnya yang berkaitan dengan pembelajaran baik yang bersifat pembelajaran didalam kelas

atau pembelajaran pendukung seperti ekstrakurikuler.

- c. Pelaksanaan kurikulum : adanya pelaksanaan setiap pendidik dalam mengerjakan tugas masing-masing yang diketahui oleh seluruh warga lembaga pendidikan.
- d. Evaluasi kurikulum : adanya rapat setiap bulan dalam rangka pelaporan penyelenggaraan pembelajaran selama berlangsung dan perbaikan.

### 3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban seseorang dalam sebuah organisasi sesuai dengan profesi/kinerjanya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan dengan cara melaporkan laporan pertanggungjawaban kinerja secara periodik. Tanggung jawab tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas atau kinerja selama dalam proses pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan tugas tersebut adalah tanggung jawab para pihak penyelenggara pendidikan.

Menurut Tjokroamijoyo pertanggungjawaban bisa digugat oleh pihak yang berhak mendapat pertanggungjawaban.<sup>24</sup> Dalam pengelolaan kurikulum, wakil kepala bagian kurikulum harus memberi pertanggungjawaban kepada warga lembaga pendidikan. Pertanggungjawaban berupa pembuatan

laporan penyelenggaraan kurikulum secara periodik atau setiap bulan yang dilaksanakan ketika rapat. Pertanggungjawaban tersebut dapat dipertanyakan dan dikoreksi oleh berbagai stakeholder sebagai bentuk pengawasan dan perbaikan. Penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara berbagai stakeholder. warga lembaga pendidikan tidak akan menyampaikan keluhan dan protes terhadap proses penyelenggaraan kurikulum yang dilaksanakan.

Dengan demikian bahwa akuntabilitas adalah sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah antara penyelenggara pendidikan. Karena dengan Akuntabilitas dalam pengelolaan kurikulum juga berkaitan dengan upaya menciptakan sistem untuk mengontrol dan memonitor kinerja agar tercipta efisiensi dan efektivitas serta kualitas kinerja yang diharapkan. Kinerja yang akuntabel adalah apabila seluruh stakeholder saling mengawasi satu sama lain. Wakil kepala sekolah bagian kurikulum serta kepala sekolah membangun sistem kontrol dan monitoring atas kinerja bawahan (guru-guru dan tenaga kependidikan) dan juga sebaliknya serta masyarakat yang selalu mengontrol dan mengawasi kinerja lembaga pendidikan. Dengan membangun sistem yang selalu mengontrol dan monitoring, prinsip akuntabilitas sebagai salah satu ciri *good governance* dapat tercipta dalam lingkungan lembaga pendidikan.

---

<sup>24</sup> Tjokroamijoyo, Bintoro. 2000. "Birokrasi dan Demokrasi". *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*. Vol.X, No. 2: 34-57.h.4-5

## 7. Kesimpulan

Prinsip-prinsip *good governance* yakni partisipasi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kurikulum tercermin pada penerapannya ketika proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. Setiap stakeholder ikut terlibat dan bebas berpendapat ketika perumusan kurikulum yang disesuaikan dengan kebijakan kurikulum yang sedang berlangsung.

Dalam proses pengorganisasian dan pelaksanaan tercermin pada pembagian tugas dan kewajiban yang harus dikerjakan masing-masing stakeholder internal yakni kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan maupun pesertadidik. Begitu pula pada proses evaluasi kurikulum yang tercermin ketika diadakannya rapat bulanan yang mengulas laporan berjalannya pembelajaran/kurikulum selama sebulan serta perbaikan-perbaikan yang akan dilaksanakan.

## Daftar Pustaka

- Arifin, Zainal. 2011. *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum Cet. I*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Dakir. 2004. *Perencanaan Dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dwiyanto, Agus. 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM
- Hamalik, Oemar. 2010. *Manajemen Pengembangan Kurikulum, Cet. IV*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Kartika, Citrawati Fitri, dkk. 2012. *Good Environmental Governance*. Malang: Universitas Brawijaya
- Mardiasmo. 2001. *Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi
- Munaf, Yusri. 2005. *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh Publishing: Riau
- Oviyanti, Fitri dkk. 2015. *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*. Palembang: Noer Fikri
- Rosyada, Dede. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Kencana
- Rusman. 2009. *Manajemen Kurikulum, Seri II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sedarmayanti. 2007. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance*. Bandung: Mandar Maju
- Sindhunata. 2001. *Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Kanisius
- Tjokroamijoyo, Bintoro. 2000. "Birokrasi dan Demokrasi". *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*. Vol.X, No. 2: 34-57